**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, Pandi. (2016) *Concept & Indicator Human Resources Management for Management Research-Edisi 1*, Cetakan 1-Yogyakarta; Deepublish.

Anugrah, Dwi, (2023) artikel “*Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*” Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Atmadja, I Dewa Gedhe & Budiarta, Nyoman Putu (2018) *Teori-Teori Hukum,* Malang, Setara Pers.

Bernard, L Tanya. et al. (2013), *Teori Hukum Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Hartini, Sri & Sudrajat, Tedi. (2017) *Hukum Kepegawaian di Indonseia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ibrahim, Johny. (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Malang, Media Publishing.

Jimly Asshiddiqie, 1956-;. (2012). *Gagasan negara hukum Indonesia / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. /*. Jakarta : BPHN

Kristiawanto (2022), *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Grup

Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum* “*The House of Law is The House of Mankind*”, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.

Mochtar, et al. (2024) *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami kaidah, Teori, Asas, dan Hukum,* Depok Rajawali Pers.

Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif,* Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.

Suci, R. (2022). *Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

Ridwan, (2010) *Hukum Administrasi Negara-Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok

Rondonuwu (2021) *Teori Hukum Dari Eksistendi ke Rekonstruksi*, Jakarta, Raja Grafinda Persada, Depok.

Simanjuntak, Yemima Andria Hotmauli. (2022). "*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja*." *Jurnal Syntax Transformation* 3.04: 552-561.

Sumantoro, I. B. (2018). *Kategorisasi PNS dan PPPK dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditinjau dari Sudut Pandang Transisi Kepegawaian*. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, *4*(2), 27-33.

Saksono, Y., & Sunyoto, D. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Konsep Dasar)*. Jakarta: PT Buku. Seru

Suteki & Taufani, Galang, (2022) *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers.

Tahir, Rusdin MSi CIQar, CIQnR. (2023) *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Taufani, Galang & Kumalasari, Galuh Wahyu. (2024), *Pengantar Ilmu Hukum Untuk Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta, PT. Anak Hebat Indonesia.

Wijaya, A. (2019)., *Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Kerja Dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang;* Universitas Sriwijaya Palembang*.*

Wulandari, N. S. (2015). *Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Melanggar Aturan Mengenai Disiplin Kerja (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Mochtar, Z. A. (2023). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen

ketiga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.